

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan. LKj Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.

LKj ini disusun berdasarkan Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan ini digunakan sebagai dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2022 sekaligus menjadi bahan penyusunan perencanaan di periode perencanaan tahun 2023.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di masa mendatang.

Jakarta, 3 Januari 2023

Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Anna Kurniati, SKM, MA, PhD

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan berisi informasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 dan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan .

Dokumen perencanaan yang mendasari laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020
2. Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
5. DIPA Tahun anggaran 2022.
6. Indikator kinerja kegiatan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022) yaitu :
 - 1) Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter
 - 2) Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi
 - 3) Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
 - 4) Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi
 - 5) Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan
 - 6) Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes

Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2022 per 31 Desember adalah sebagai berikut :

No	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	Yankes & JKN	97.057.645.000	58.985.567.438	60,77%
2.	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	533.284.026.000	505.468.174.976	94,78%
Total		630.341.671.000	564.453.742.414	89,55%

Capaian Kinerja Kegiatan tahun 2022 (per 31 Desember) sebagai berikut :

No.	IKK	Target	Capaian	%
1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96%	96%
2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%	34 %	34 %
3	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%	56%	56%
4	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %	100%	100%
5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	500 orang	100%
6	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	98,99%	98,99%
	Rata-rata capaian			80,83%

Capaian IKK belum seluruhnya dapat mencapai 100%, capaian tertinggi capaian yaitu Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan, Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi dengan capaian 100 %. Sementara capaian terendah yaitu Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi sebesar 34 %.

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i.
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii.
DAFTAR ISI	iv.
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS DAN FUNGSI	3
C. VISI DAN MISI	5
D. SUMBERDAYA	6
E. SISTEMATIKA	9
F. PERMASALAHAN UTAMA	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020 -2024.....	13
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA	16
D. STRATEGI	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. REALISASI ANGGARAN	29
BAB IV : PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. RENCANA TINDAK LANJUT	43
LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 :	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LAMPIRAN 2 :	PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2022
LAMPIRAN 3 :	JUMLAH DAN JENIS TENAGA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM TAHUN 2022
LAMPIRAN 4 :	JUMLAH DAN JENIS TENAGA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS INDIVIDU (REGULER) TAHUN 2022
LAMPIRAN 5 :	JUMLAH PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2022
LAMPIRAN 6 :	JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP PER PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 7 :	JUMLAH PENDAYAGUNAAN SDM LUAR NEGERI TAHUN 2022
LAMPIRAN 8 :	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSRENGUN 2022 – 2024 (PERMENKES 21 TAHUN 2020 TENTANG RENSTRA KEMKES 2020 – 2024
LAMPIRAN 9 :	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN 2022 – 2024 (PERMENKES 13 TAHUN 2022 TENTANG RENSTRA KEMKES 2020 – 2024)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber Daya Manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Berkenaan dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melaksanakan enam sasaran pokok RPJMN Tahun 2020-2024 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, yaitu (1) meningkatkan status kesehatan dan status gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Dalam melaksanakan program-programnya, Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah, berkewajiban untuk berkinerja secara akuntabel, meskipun dalam kondisi pandemi Covid 19 yang menjadi tantangan tersendiri dan memerlukan berbagai macam penyesuaian dan modifikasi kegiatan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas (instansi) tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) Kementerian Kesehatan menyampaikan laporan informasi kinerja kepada

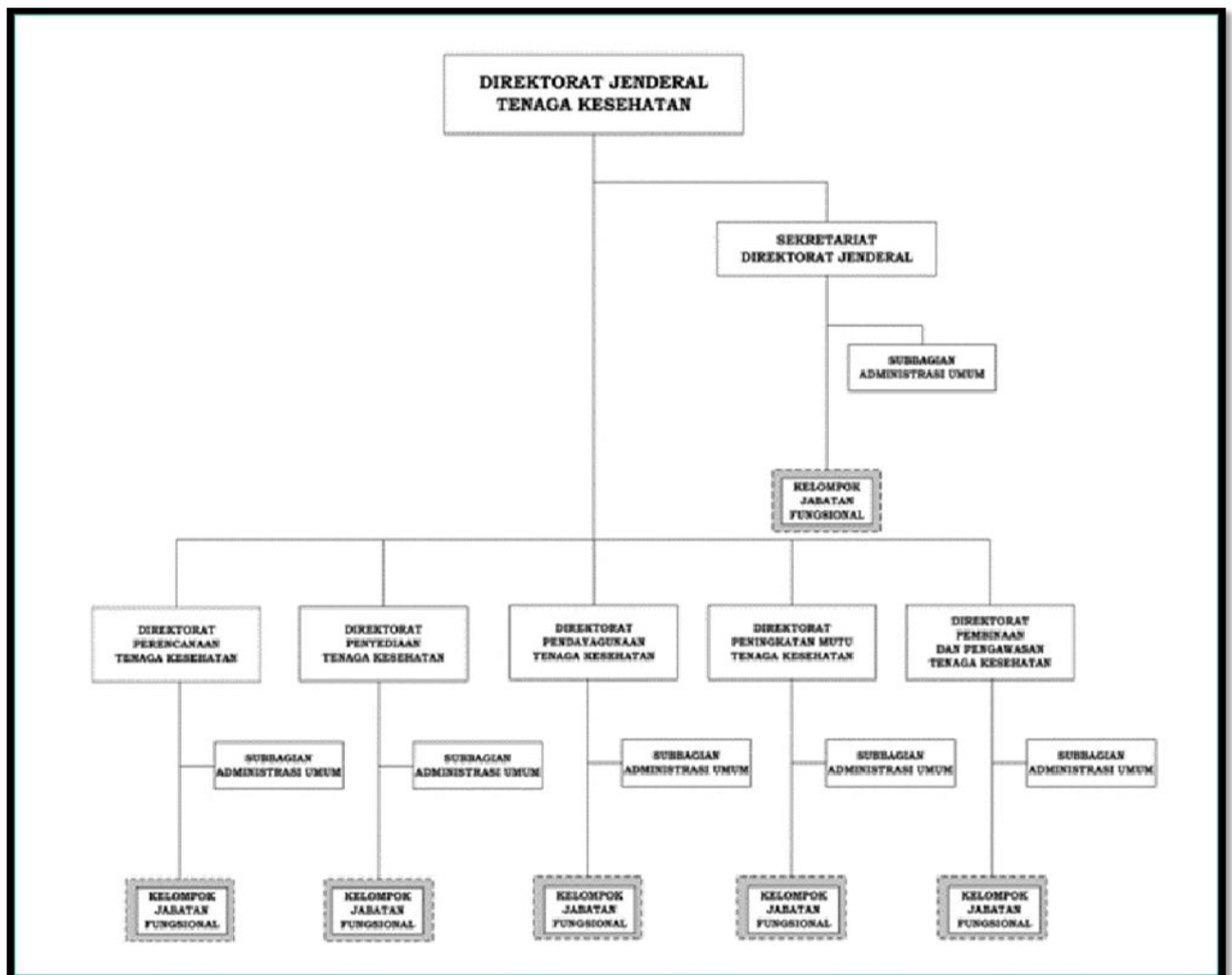
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dalam hal ini melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Penyusunan LKj Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2022. Hal ini ditujukan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan. Laporan ini juga bertujuan sebagai dokumen monitoring dan evaluasi sekaligus menjadi bahan penyusunan perencanaan di periode perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan menggunakan pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penyerapan keuangan dan presentase serta jumlah keluaran (output). Penyusunan LKj Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2020-2024, Rencana Aksi Program Ditjen Nakes Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ;



Tugas dan fungsi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Tugas Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan.

Fungsi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada tahun 2022 pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi Analis Kebijakan, Administrator Kesehatan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Analis Kepegawaian/SDM Aparatur, Arsiparis, Pranata Keuangan APBN

C. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”.

Mengacu pada visi pemerintah, maka Kementerian Kesehatan menetapkan Visi Kementerian Kesehatan 2020-2024: “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi pemerintah tahun 2020-2024 ditetapkan misi pemerintah 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan

D. SUMBER DAYA

Untuk dapat melaksanakan kegiatan di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan diperlukan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan maupun sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya merupakan bagian utama dalam mencapai keberhasilan suatu visi dan misi dari suatu organisasi.

Sumber daya manusia pelaksana Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, perlu diupayakan mencukupi baik jumlah, jenis maupun mutunya sesuai dengan kebutuhan di lingkungan unit kerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan melalui penghitungan Analisis Beban Kerja. Peningkatan mutu SDM di lingkungan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan secara bertahap melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan. Pelatihan bagi SDM Kesehatan didasarkan atas kompetensi yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2022 jika berdasarkan Analisis Beban Kerja sejumlah 116 orang namun yang tersedia hanya 68 orang yang terdiri :

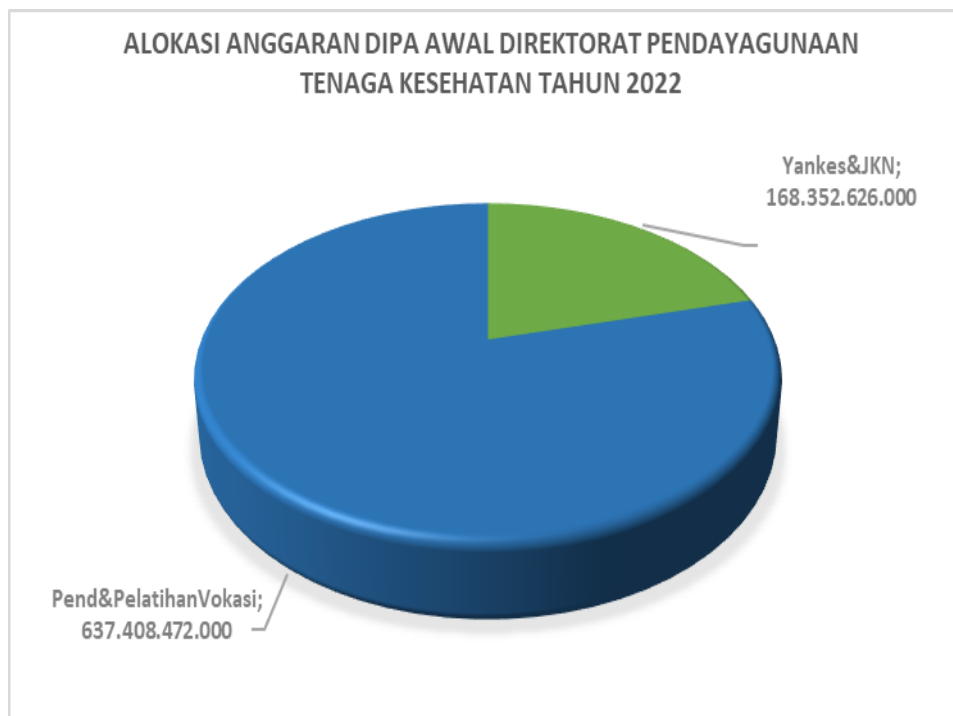
- PNS sejumlah 45 orang
- PPNP sejumlah 9 orang
- Tenaga alih daya sejumlah 14 orang

2. SUMBERDAYA PEMBIAYAAN

Pada tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menggunakan satu DIPA yaitu DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Pada satu DIPA tersebut, alokasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2022 pada DIPA awal Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK yaitu Rp.805.761.098.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbagi dalam 3 (tiga) program, yaitu:

- Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Alokasi Anggaran DIPA Awal Pusrengun SDMK Tahun 2022



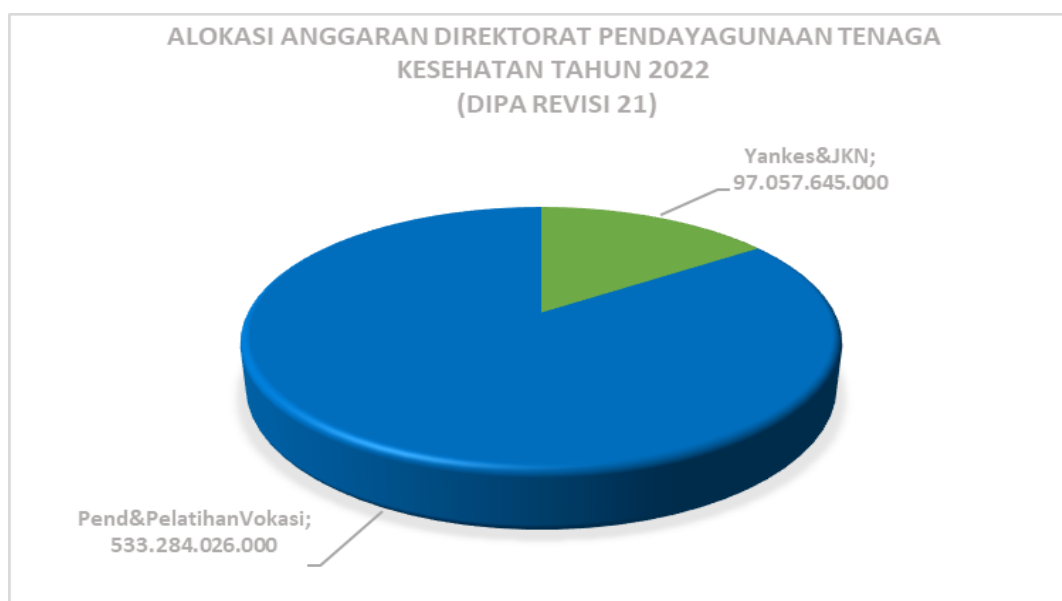
Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan 21 kali revisi DIPA. Alokasi anggaran (pagu efektif) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada Triwulan IV tahun 2022 sejumlah Rp. 630.341.671.000 (enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) Kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- b. Kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan;

Alokasi anggaran tahun 2022 tersebut terdiri dari:

- a. Anggaran kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Rp. 97.057.645.000;
- b. Anggaran kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Rp. 533.284.026.000;

**Alokasi Anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022
(DIPA Revisi 21)**



3. SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per 31 Desember Tahun 2022 bernilai Rp 1.272.094.980 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi
Per 31 Desember 2022

Akun Neraca		Jumlah (Rp)
Kode	Uraian	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	38.891.260
132111	Peralatan dan Mesin	3.785.468.764
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.911.809.044)
162151	Software	1.942.731.568
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1.583.187.568)
Jumlah		1.272.094.980

E. SISTEMATIKA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini dijelaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut, serta

kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selanjutnya disampaikan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang meliputi 1) latar belakang yang berisi uraian singkat, gambaran umum dan maksud dan tujuan penulisan laporan, 2) tugas pokok dan fungsi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, 3) Visi dan Misi, 4) Sumberdaya dan 5) Sistematika penyajian laporan, 6) Permasalahan utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang upaya pokok, arah kebijakan dan strategi. Dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja disajikan Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk diuraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi/unit organisasi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

F. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang dihadapi pada 2022 adalah:

1. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan mobilitas, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang biasanya diselenggarakan secara luring
2. Disparitas pemenuhan Tenaga Kesehatan baik secara kuantitas maupun kompetensi antar daerah di Indonesia
3. Perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Khususnya di tingkat eselon I Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
4. Pendayagunaan SDM Kesehatan yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

Beberapa isu strategis yang memerlukan upaya tindak lanjut dan modifikasi kegiatan untuk penyesuaian dalam masa pandemi Covid-19 dan Perubahan SOTK baru di Lingkungan Kementerian Kesehatan, antara lain :

1. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan
2. Peningkatkan sosialisasi dan advokasi dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah Daerah untuk program yang ada di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terkait pemenuhan tenaga kesehatan terutama di puskesmas sesuai standar, serta dokter spesialis di rumah sakit
3. Percepatan penetapan regulasi adaptasi/pendayagunaan dokter spesialis WNI lulusan luar negeri, pelaksanaan internsip dokter gigi.
4. Penyusunan regulasi untuk pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang terarah dan bersinergi, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Hal ini tidak hanya bergantung pada pimpinan, tetapi para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi. Dengan demikian kualitas kinerja pegawai merupakan hal mutlak demi memaksimalkan pelayanan, baik internal maupun secara eksternal.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Sarana dan prasarana tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Perencanaan kinerja memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi sistem kesehatan.

Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi system kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut

mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan;
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi di sektor kesehatan

A. RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas 65% Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar, 45% Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya, dan 25 % Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi. Dalam rangka mendukung capaian indikator sasaran hasil tersebut, maka

disusun Indikator Kinerja Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Matrik Target Indikator Kinerja Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program : Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)					
Persentase puskesmas tanpa dokter	6	0	0	0	0
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	70	75	80	85	90
Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	41.669	39.627	40.275	40.437	40.585

Indikator kinerja program tersebut mengalami perubahan sejalan dengan perubahan/revisi Renstra Kemenkes sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matrik Target Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024

Indikator	TARGET		
	2022	2023	2024
Persentase puskesmas dengan dokter	100	100	100
Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65	71	83
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	80	85	90
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	25	60	100

Untuk mendukung capaian indikator kinerja program tersebut pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan diturunkan menjadi kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan, yang kemudian diturunkan

menjadi indikator kinerja kegiatan. Adapun sasaran kegiatan dan indikator Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang dituangkan dalam Permenkes 13 tahun 2020 terkait Revisi Renstra Kemenkes tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024
(Permenkes 13 tahun 2020)

Indikator	Target		
	2022	2023	2024
Program : Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			
Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			
Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100 %	100 %	100%
Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40 %	50 %	60%
Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%	80%	90%
Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%
Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	600 orang	700 orang
Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
Kegiatan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan			
Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98 %	98%	98%

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2022 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja Tahun 2022, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang sebelumnya Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan Pusat Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun anggaran 2022 seperti di bawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	1. Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	5400 orang
		2. Jumlah Calon Dokter Spesialis pada Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen)	100 orang
		3. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang di dayagunakan	700 orang
		4. Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	600 orang
		5. Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	39 dokumen
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		6. Jumlah Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar	390 orang

		Negeri	
2	Terlaksananya internsip dokter	Jumlah Dokter yang melaksanakan Internsip	12.000 orang

Sesuai dengan Permenkes no 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan PMK no 13 Tahun 2022 tentang perubahan Permenkes nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, maka perjanjian kinerja Pusrengun direvisi menjadi perjanjian kinerja Ditgunnakes sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Revisi
Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
		Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%
		Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%
		Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %
		Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang
2.	Terlaksananya Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

D. STRATEGI

Strategi dalam mendukung program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui penugasan khusus tenaga Kesehatan, pendayagunaan dokter spesialis, pendayagunaan dokter spesialis WNI lulusan luar negeri, pendayagunaan tenaga Kesehatan Indonesia ke luar negeri.
2. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui program internsip dokter dan dokter gigi.
3. Advokasi terhadap Pemerintah Daerah dan stake holder terkait dalam pemenuhan tenaga kesehatan dan SDM kesehatan di fasilitas pelayan kesehatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis terhadap *baseline* serta akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di tahun 2022. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan Permenkes 13 tahun 2022 tentang perubahan Pemenkes nomor 20 tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes periode tahun 2020-2024.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Hasil pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna dan dapat memberikan gambaran pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 adalah:

- 1) Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter sebesar 100 %
- 2) Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi sebesar 40 %
- 3) Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar sebesar 60%
- 4) Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi sebesar 100%
- 5) Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebesar 500 orang
- 6) Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes sebesar 98 %

Tabel 3.1

Matrik Target Indikator Kinerja Program Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program : Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)					
Persentase puskesmas tanpa dokter	6	0	0	0	0
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	70	75	80	85	90
Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	41.669	39.627	40.275	40.437	40.585

Dalam mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan PPSPDMK, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM mempunyai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Selanjutnya Pusrengun SDM menyusun target tahunan yang merupakan pelaksanaan dari Indikator Kinerja

Kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan telah ditetapkan di akhir tahun 2021, seperti yang tercantum pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Matrik Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan TA 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	1. Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	5.400 orang
		2. Jumlah Calon Dokter Spesialis pada Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen)	100 orang
		3. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang di dayagunakan	700 orang
		4. Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	600 orang
		5. Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	39 dokumen
		6. Jumlah Pendayagunaan SDMK Luar Negeri	390 orang
2	Terlaksananya internsip dokter	Jumlah Dokter yang melaksanakan Internsip	12.000 orang

Pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 terbit Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja di Kementerian Kesehatan, dimana terdapat perubahan unit kerja pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (semula Badan PPSPDM Kesehatan) dimana Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan **berubah menjadi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dan Direktorat Pendayagunaan Kesehatan**, maka dilakukan revisi target Perjanjian Kinerja seperti terlihat pada tabel 3.3. :

Tabel 3.3.
Matrik Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Pendayagunaan Kesehatan TA 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pendayagunaan Tenaga Kesehatan	1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
		2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%
		3. Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%
		4. Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %
		5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang
2	Terlaksananya Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

Capaian target dari Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2021 terlihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Target Perjanjian Kinerja
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan TA 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	1. Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	8.943 orang	9.433 orang (105,48%)
		2. Jumlah Calon Dokter Spesialis pada Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen)	100 orang	157 orang (157%)
		3. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang didayagunakan	500 orang	582 orang (116,4%)
		4. Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	130 orang	0

		5. Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	39 dokumen	38 dokumen (97,43%)
		6. Jumlah Pendayagunaan SDM Luar Negeri	370 orang	355 orang (95,95%)
2	Terlaksananya internsip dokter	Jumlah Dokter yang melaksanakan Internsip	12.000 orang	10.694 orang (89,12%)

Capaian kinerja tahun 2021 dari 7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Sejumlah 3 IKK capaiannya di atas 100% yaitu Jumlah Kumulatif Penempatan Baru dan Pemulangan Tenaga Kesehatan pada Penugasan Khusus, Jumlah Calon Dokter Spesialis pada Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen) dan Jumlah Lulusan Pendidikan Dokter Spesialis Baru yang Didayagunakan.
- Terdapat 3 IKK yang capaiannya 89% hingga 97% yaitu Jumlah Dokter yang Melaksanakan Internsip, Jumlah Pendayagunaan SDM Luar Negeri dan Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan. Jumlah Dokter yang melaksanakan internsip belum bisa mencapai target 100% karena minat peserta PIDI pada tahun 2021 berkurang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan KIDI Pusat tahun 2021 belum terbentuk. Untuk pendayagunaan SDM Luar Negeri belum bisa 100% karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan perjalanan dari dan ke luar negeri serta menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang sangat dinamis, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa berjalan sesuai jadwal. Untuk dokumen perencanaan, terdapat 1 provinsi yang tidak menyerahkan Dokumen Perencanaan Kebutuhan karena tidak mengikuti time line penyusunannya.
- Terdapat 1 IKK yg capaiannya 0 orang yaitu Jumlah Dokter Pasca Internsip yang didayagunakan. Hal ini disebabkan karena penyusunan rancangan Kepmenkes tentang Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip belum selesai hingga akhir tahun 2021.

Dikarenakan adanya perubahan SOTK dan perubahan IKK pada tahun 2022, maka capaian IKK tahun 2021 Pusrengun SDM tidak bisa disandingkan dengan capaian IKK Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2022.

Target kinerja tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja kegiatan pada Renstra Kemenkes sebagai berikut :

Tabel 3.5
Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
 (Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Permenkes No 20 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020 - 2024)

No	Indikator		Target		
			2022	2023	2024
1.	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan				
	a.	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	100 %	100%
	b.	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%	50 %	60%
	c.	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%	80%	90%
	d.	Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %	100%	100%
	e.	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	600 orang	700 orang
2.	Terlaksananya internsip Tenaga Kesehatan		98%	98%	98%
	a.	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes			

Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program/Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

a) Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter

Definisi operasional: Persentase pemenuhan puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang belum memiliki dokter yang dipenuhi melalui dokter pendayagunaan paska internsip, CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan. Formulasi perhitungannya adalah jumlah puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang belum memiliki dokter yang dipenuhi melalui dokter pendayagunaan paska internsip, CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah puskesmas teregistrasi yang layak operasional tanpa dokter dikali dengan 100.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Puskesmas Yang Sudah Memiliki Minimal Satu Dokter adalah 100 % dengan **capaian per 31 Desember 2022** adalah 96%, dengan justifikasi Jumlah Puskesmas Ada Dokter = 10.000, Total Puskesmas yang teregistrasi = 10.417

Kendala/tantangan yang ditemui adalah tenaga dokter yang mendaftar penugasan khusus, CPNS, lebih sedikit dari jumlah lokus/formasi yang tersedia, tenaga dokter cenderung memilih lokus tertentu, sementara rekrutmen PPPK baru dimulai bulan Oktober 2022.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait pemenuhan tenaga dan dilakukan rekrutmen penugasan khusus tenaga dokter bulan Oktober dan November 2022

b) Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi,

Definisi Operasional: Persentase pemenuhan puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang sudah dilengkapi dengan sarana pelayanan gigi yang belum memiliki dokter gigi yang dipenuhi melalui dokter gigi CPNS/PNS, P3K, BLUD dan pendayagunaan lainnya. Formulasi perhitungannya adalah jumlah penambahan puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi yang belum memiliki dokter gigi yang dipenuhi dokter gigi melalui CPNS/PNS, P3K, BLUD dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan DIBAGI dengan jumlah puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi yang belum memiliki dokter gigi dikali 100

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi 40% dan **capaian per 31 Desember 2022** adalah 34 % dengan justifikasi jumlah Puskesmas teregistrasi yang memiliki dental unit = 6.893, jumlah Puskesmas teregistrasi yang memiliki dental unit dan memiliki dokter gigi per Desember 2021 = 5.225 (baseline), jumlah pemenuhan dokter gigi pada puskesmas yang memiliki dental unit sampai dengan Desember 2022 = 524

Kendala/tantangan yang ditemui adalah tenaga dokter gigi yang mendaftar penugasan khusus, CPNS, lebih sedikit dari jumlah lokus/formasi yang tersedia, sementara rekrutmen PPPK baru dimulai bulan Oktober 2022.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait pemenuhan tenaga dan dilakukan rekrutmen penugasan khusus tenaga dokter gigi bulan Oktober dan November 2022

c) Persentase Puskesmas yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar

Definisi Operasional: Persentase puskesmas teregistrasi yang layak operasional

yang memiliki 9 tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, Kesmas/Promkes, Kesling, tenaga kefarmasian, gizi, dan ATLM) dan 2 tenaga pendukung (pengelola keuangan dan tenaga IT) melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan. Formulasi perhitungannya adalah jumlah puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang memiliki 9 jenis nakes dan 2 tenaga pendukung yang ditempatkan melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan dibagi dengan total puskesmas teregistrasi yang layak operasional dikali 100

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar 60%, dan **capaian per 31 Desember 2022** sejumlah 56%. Justifikasi perhitungannya adalah jumlah puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan = 5.831 unit, Jumlah puskesmas belum memenuhi 9 jenis nakes = 4.586 unit, Total puskesmas yang teregistrasi = 10.417 unit.

Kendala/tantangannya adalah tidak semua puskesmas mempertahankan SDM Kesehatan (tenaga IT dan Keuangan) setelah habis masa kontrak DAK Non Fisik. Tidak semua puskesmas merekrut SDM Kesehatan dengan pembiayaan mandiri.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan advokasi terhadap daerah untuk tetap mendayagunakan tenaga penunjang sebelumnya yang ditempatkan melalui DAK Non Fisik dengan pembiayaan mandiri dari daerah.

Ketiga Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan didukung oleh kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Tim, Individu dan pendayagunaan dokter pasca internsip.

Kegiatan pendukung pertama adalah Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (Nusantara Sehat Tim) yang merupakan pendayagunaan SDM Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah lebih dari 5 jenis tenaga kesehatan yang ditempatkan secara tim/berkelompok, sedangkan pendukung yang kedua adalah Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (Nusantara Sehat Individu) dimana jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara individual. Jenis tenaga yang ditempatkan terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga analis teknologi laboratorium medik. Kurun waktu penugasan selama 2 tahun pada lokus puskesmas dengan kriteria sangat terpencil dan terpencil sesuai dengan rencana kebutuhan Kementerian Kesehatan.

Pendayagunaan dokter pasca internsip merupakan pendayagunaan dokter yang telah menyelesaikan internsip yang didayagunakan melalui CPNS, PPPK, BLUD, penugasan khusus dan pendayagunaan lainnya.

d) Persentase Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi

Definisi Operasional: Persentase dokter spesialis WNI LLN yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi terhadap total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi. Formulasi perhitungannya adalah jumlah dokter spesialis WNI LLN yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi dibagi total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi dikali 100

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi sebesar 100%. **Capaian per 31 Desember 2022** adalah 100%, dengan justifikasi bahwa saat ini telah ditempatkan 3 orang dokter spesialis Orthopedi dan Traumatologi di RSUD Fauziah Bireun Aceh, RSUD Cut Meutia Aceh Utara dan RSUD ODSK Sulawesi Utara pada Angkatan pertama. Sedangkan pada angkatan kedua, telah ditempatkan 3 orang dokter spesialis Ilmu Penyakit Dalam (pada RSUD Kubu Raya Kalimantan Barat, RSUD Palatak Kepulauan Riau dan RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Lampung) dan 1

orang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Gorontalo. Dengan demikian capaiannya adalah $7/7 = 100\%$.

Kendala/tantangan yang dihadapi adalah peserta yang mendaftar program adaptasi tidak bersamaan dan tidak berdekatan dengan jadwal ujian penilaian kompetensi, sehingga masih belum semua pendaftar mengikuti tahapan pra adaptasi.

Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan subkomite evaluasi kompetensi dengan Kolegium untuk mempercepat proses penilaian kompetensi pra adaptasi dan Finalisasi pedoman program adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri.

e) Jumlah Lulusan Dokter Spesialis Yang Didayagunakan

Definisi Operasional: jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS Pemerintah. Formulasi perhitungannya adalah jumlah absolut lulusan pendidikan dokter spesialis penerima

bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS pemerintah tiap tahun.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan 500 orang, **capaian per 31 Desember 2022** adalah 500 orang, dengan persentase capaian nya 100 %. Justifikasi perhitungannya adalah Penempatan PGDS pada tahun 2022 hanya 5x dalam setahun. Penempatan tahun 2022 terdiri dari:

- PGDS 17 (Maret 2022): 146 orang
- PGDS 18 (Juni 2022): 122 orang
- PGDS 19 (Juli 2022): 41 orang
- PGDS 20 (September 2022): 80 orang
- PGDS 21 (November 2022): 111 orang

Kendala/tantangan yang ditemui adalah belum semua RSUD mengusulkan kebutuhan dokter spesialisnya sehingga pilihan lokasi RS penempatan tenaga PGDS terbatas dan PGDS bersifat *voluntary* sehingga peminatnya sedikit.

Upaya yang dilakukan adalah mengingatkan RSUD melalui Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota terkait periode pengusulan, menambah RSUD sebagai lokasi penempatan dengan visitasi dan Percepatan Perpres Bakti Kerja Dokter Spesialis

f) Persentase Dokter Internsip yang Kompeten Dalam Melaksanakan Program Prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes

Definisi Operasional: persentase dokter dan dokter gigi internsip yang memenuhi

target kinerja sesuai dengan program prioritas Kemenkes. Formulasi perhitungannya adalah jumlah dokter dan dokter gigi Internsip yang telah memenuhi target kinerja sesuai dengan program prioritas Kemkes dibagi dengan jumlah dokter dan dokter gigi Internsip yang diberangkatkan pada tahun sebelumnya dikali 100

Target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan 98%, **capaian per 31 Desember 2022** adalah 98,99 %, dengan justifikasi jumlah dokter dan dokter gigi yang diberangkatkan pada tahun 2021 sejumlah 10.701 orang, jumlah dokter dan dokter gigi Internsip yang telah memenuhi target kinerja per 31 Desember 2022 sejumlah 10.592 orang.

Kendala/tantangan yang ditemui adalah penempatan Internsip di tahun 2021 masih dalam kondisi pandemik Covid 19, sehingga terdapat relaksasi pelaksanaan internsip di 2021 dengan durasi 9 bulan di angkatan I – III. Ppada angkatan IV tahun 2021 pelaksanaan internsip kembali dilaksanakan selama durasi 12 bulan penugasan dengan perodesasi 6 bulan di Rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Pusrengun SDMK dikelompokkan dalam 2 program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Alokasi pada DIPA awal Pusrengun TA 2022 yaitu Rp. Rp.805.761.098.000. Dalam perjalanannya terdapat Perubahan SOTK baru dan Perubahan Renstra Kementerian

Kesehatan 2020 - 2024 maka alokasi anggaran mengalami revisi yang dapat terlihat pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Revisi DIPA Tahun 2022

DIPA	Program Pelayanan Kesehatan JKN (Rp)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp)	Total Alokasi (Rp)	Keterangan
AWAL	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 1	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 3	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 4	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 5	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 6	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 7	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 8	168.352.626.000	637.408.472.000	805.761.098.000	
REV 9	129.460.116.000	533.573.626.000	663.033.742.000	Menjadi 2 Kegiatan di Program Yankes JKN (2078, 6812)
REV 10	129.460.116.000	533.573.626.000	663.033.742.000	
REV 11	129.460.116.000	533.573.626.000	663.033.742.000	
REV 12	129.460.116.000	533.573.626.000	663.033.742.000	
REV 13	129.460.116.000	533.284.026.000	662.744.142.000	Penyesuaian Target pada Keg.2078 dan 6812, Penghapusan blokir pada Keg. 5234
REV 14	129.460.116.000	533.284.026.000	662.744.142.000	
REV 15	129.460.116.000	533.284.026.000	662.744.142.000	
REV 16	129.460.116.000	533.284.026.000	662.744.142.000	
REV 17	129.460.116.000	533.284.026.000	662.744.142.000	
REV 18	129.460.116.000	533.284.026.000	662.744.142.000	
REV 19	129.460.116.000	533.284.026.000	662.744.142.000	
REV 20	98.062.253.000	533.284.026.000	631.346.279.000	penghapusan blokir AA pada Keg.6812 dan Penurunan Target pada RO Pendayagunaan

DIPA	Program Pelayanan Kesehatan JKN (Rp)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp)	Total Alokasi (Rp)	Keterangan
				TKWNI LLN
REV 21	98.062.253.000	533.284.026.000	631.346.279.000	
REV 22	98.062.253.000	533.284.026.000	631.346.279.000	

Dari 22 kali revisi DIPA tersebut, realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2022 per 31 Desember 2022 (per program)

No	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	Yankes & JKN	97.057.645.000	58.985.567.438	60,77%
2.	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	533.284.026.000	505.468.174.976	94,78%
3.	Dukungan Manajemen			
Total		630.341.671.000	564.453.742.414	89,55%

Keterangan:

Perbedaan data alokasi DIPA revisi 22 di program Yankes & JKN sebesar **Rp. 98.062.253.000** dengan alokasi Program Yankes & JKN di Tabel 3.21 sebesar **Rp. 97.057.645** terdapat di dokumen Rincian Kertas Kerja Satker TA 2022 di Kegiatan 2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan sebesar **Rp. 1.004.608.000** yang digunakan oleh Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, dengan rincian;

- Rincian Output (RO) 2078.ABG.002 (Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan) dengan nominal Rp. 763.692.000;
- Klasifikasi Rincian Output (KRO) 2078 FBA (Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah[Base Line] dengan nominal Rp. 159.866.000;
- KRO 2078 PBG (Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line]) dengan nominal Rp. 81.050.000;

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
per 31 Desember 2022

	Program/KRO	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	97.057.645.000	58.985.567.438	60,77%
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	17.303.880.000	15.756.740.589	91,06%
2078.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	4.000.000	1.758.600	43,97%
2078.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	474.522.000	450.076.875	94,85%
2078.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	16.825.358.000	12.966.657.549	77,07%
6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	79.753.765.000	45.567.074.414	57,13%
6812.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	140.500.000	125.520.800	89,34%
6812.AEB	Forum	139.000.000	138.000.000	99,28%
6812.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.247.501.000	1.191.942.840	95,55%
6812.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	107.582.000	64.003.200	59,49%
6812.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	78.119.182.000	44.047.607.574	56,39%
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	533.284.026.000	505.468.174.976	94,78%
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	533.284.026.000	505.468.174.976	94,78%
5234.DBA	Pendidikan Tinggi	533.284.026.000	505.468.174.976	94,78%
	Total	630.341.671.000	564.453.742.414	89,55%

Tabel 3.23
Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/KRO/RO		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*	% Realisasi	Target Output		Jumlah	% Capaian Output
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	97.057.645.000	61.323.815.003	63,18%				
2078.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan SDM Luar Negeri	4.000.000	1.758.600	43,97%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00%
2078.BAA.001	Pendayagunaan SDM Indonesia ke Luar Negeri	297.760.000	284.184.600	95,44%	316	Orang	316	100,00%
2078.BAA.002	Pendayagunaan SDM Warga Negara Asing	176.762.000	165.892.275	93,85%	2	Orang	2	100,00%
2078.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	4.843.879.000	3.880.637.675	80,11%	449	Orang	449	100,00%
2078.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	505.170.000	455.618.319	90,19%	123	Orang	123	100,00%
2078.QAA.003	Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	9.467.940.000	7.014.789.560	90,48%	940	Orang	941	100,11%
2078.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis	1.736.369.000	1.415.804.945	81,54%	259	Orang	259	100,00%
2078.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	39.240.000	9.046.900	23,06%	9	Orang	9	100,00%
2078.QAA.007	Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	176.000.000	137.792.150	78,29%	69	Orang	69	100,00%
2078.QAA.008	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	56.760.000	52.968.000	93,32%	1	Orang	0	0,00%
6812.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan SDM Luar Negeri	140.500.000,00	125.520.800	89,34%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00%

PROGRAM/KRO/RO		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*	% Realisasi	Target Output		Jumlah	% Capaian Output
6812.AEB.001	Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pendayagunaan SDM K WNA tingkat Bilateral/ Regional/ Multilateral	139.000.000,00	138.000.000	99,28%	3	Forum	3	100,00%
6812.BAA.001	Pendayagunaan SDM Indonesia Ke Luar Negeri	1.013.380.000,00	986.135.840	97,31%	24	Orang	113	470,83%
6812.BAA.002	Pendayagunaan SDM Warga Negara Asing	234.121.000,00	205.807.000	87,91%	48	Orang	82	170,83%
6812.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Penugasan Khusus	107.582.000,00	64.003.200	59,49%	1	Rekomendasi Kebijakan	75%	75,00%
6812.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	24.229.977.000,00	13.321.238.314	54,98%	751	Orang	486	64,71%
6812.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	2.913.620.000,00	1.251.128.720	42,94%	77	Orang	83	107,79%
6812.QAA.003	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	28.818.172.000,00	13.817.036.003	47,95%	3.060	Orang	2.845	92,97%
6812.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis	8.522.692.000,00	6.749.617.344	79,20%	220	Orang	225	102,27%
6812.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	671.495.000,00	567.441.400	84,50%	11	Orang	7	63,64%
6812.QAA.006	Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip	6.229.236.000,00	6.044.108.150	97,03%	1.000	Orang	1.732	173,20%
6812.QAA.007	Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	769.000.000,00	477.107.616	62,04%	31	Orang	37	119,35%
6812.QAA.008	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	5.818.850.000,00	1.676.615.627	28,81%	199	Orang	7	3,52%

PROGRAM/KRO/RO		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*	% Realisasi	Target Output		Jumlah	% Capaian Output
6812.QAA.009	Pendayagunaan caregiver sebagai inovasi pelayanan bagi lansia	146.140.000	143.314.400	98,07%	25	Orang	9	36,00%
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	533.284.026.000	505.468.174.976	94,78%				
5234.DBA.001	Internsip Dokter	516.029.159.000	493.577.484.633	95,65%	12.000	Orang	10.524	87,70%
5234.DBA.002	Internsip Dokter Gigi	17.254.867.000	11.890.690.343	68,91%	500	Orang	392	78,40%
Total		630.341.671.000	564.453.742.414	89,55%				

Realisasi per Rincian Output (RO) seperti tertera pada tabel 3.23 menggunakan data realisasi anggaran berdasarkan jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Sebagai gambaran capaian kinerja dan anggaran dari masing-masing RO Pusrengun SDM tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.24
Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM/KRO/RO		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*	% Realisasi	Target Output	% Capaian Output
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	78.790.350.000	64.147.308.787	81,42%		
2078.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan SDM Luar Negeri	443.528.000	424.622.500	95,74%	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan
2078.ABG.002	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	4.104.797.000	3.855.240.298	93,92%	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan
2078.AEB.001	Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pendayagunaan SDM WNA tingkat Bilateral/Regional/Multilateral	104.210.000	100.635.400	96,57%	4 forum	4 forum
2078.BAA.001	Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	893.750.000	587.786.104	65,77%	100 orang	157 orang
						157%

PROGRAM/KRO/RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*	% Realisasi	Target Output	% Capaian Output	PROGRAM/KRO/RO
2078.BAA.002	Pendayagunaan SDM Indonesia ke Luar Negeri	720.282.000	626.828.300	87,03%	320 orang	348 orang (108,75%)
2078.BAA.003	Pendayagunaan SDM Warga Negara Asing	205.051.000	192.630.000	93,94%	50 orang	7 orang 14%
2078.BAA.004	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	238.655.000	228.276.800	95,65%	45 orang	0
2078.FBA.002	Fasilitasi dan Pembinaan daerah	189.580.000	179.475.200	94,67%	1 provinsi	1 provinsi 100%
2078.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota	877.510.000	780.640.100	88,96%	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan
2078.PBG.002	Penyusunan Kebijakan Penugasan Khusus	85.875.000	0	0,00%	1 dokumen	1 dokumen draf KMK
2078.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	26.891.673.000	21.296.527.072	79,19%	1.593 orang	1.411 orang 88,57%
2078.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	4.155.420.000	3.039.403.426	73,14%	270 orang	479 orang 175,56%
2078.QAA.003	Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	34.468.165.000	28.124.040.102	81,59%	7.080 orang	7.537 orang 106,47%
2078.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis	5.293.924.000	4.648.778.185	87,81%	480 orang	552 orang 115%
2078.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	98.230.000	62.425.300	63,55%	20 orang	30 orang 150%
2078.QAA.006	Pendayagunaan Dokter pasca internsip	19.700.000	0	0,00%	130 orang	0

PROGRAM/KRO/RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran*	% Realisasi	Target Output	% Capaian Output	PROGRAM/KRO/RO
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	473.263.272.000	419.071.671.476	88.55%		
5234.DBA.001	Internsip Dokter	473.149.592.000	419.071.671.476	88.57%	12.000 orang	10.694 orang 88,23%
5234.DBA.002	Internsip Dokter Gigi	113.680.000	0	0.00%	120 orang	0
Total		552.053.622.000	483.218.980.263	87,59%		

Realisasi dan capaian pada tabel 3.24 menggunakan data Capaian LKJ 2021

Apabila RO yang masih dilaksanakan pada tahun 2022 disandingkan dengan RO 2021 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.25
Sandingan Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 - 2022

PROGRAM/KRO/RO	Anggaran						Output					
	2021			2022			2021			2022		
	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Capaian Output	% Capaian	Target Output	Capaian Output	% Capaian
0.24.12.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	78.790.350.000	64.147.308.787	81,42%	97.057.645.000	58.985.567.438							
Kebijakan Pendayagunaan SDM Luar Negeri	443.528.000	424.622.500	95,74%	144.500.000	127.279.400	88,08%	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	100%	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100,00%
Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	4.104.797.000	3.855.240.298	93,92%				4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	100%			
Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pendayagunaan SDM WNA tingkat Bilateral/Regional/Multilateral	104.210.000	100.635.400	96,57%	139.000.000	138.000.000	99,28%	4 forum	4 forum	100%	3 forum	3 forum	100,00%

PROGRAM/KRO/RO	Anggaran						Output					
	2021			2022			2021			2022		
	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Capaian Output	% Capaian	Target Output	Capaian Output	% Capaian
Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	893.750.000	587.786.104	65,77%	945.000.000	614.899.766	65,07%	100 orang	157 orang	157%	100 orang	106 orang	106,00%
Pendayagunaan SDM Indonesia ke Luar Negeri	720.282.000	626.828.300	87,03%	1.311.140.000	1.270.320.440	96,89%	320 orang	348 orang	108,75%	340 orang	429 orang	126,18%
Pendayagunaan SDM WNA	205.051.000	192.630.000	93,94%	410.883.000	371.699.275	90,46%	50 orang	7 orang	14%	50 orang	84 orang	168,00%
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	238.655.000	228.276.800	95,65%	5.875.610.000	1.729.583.627	29,44%	45 orang	0	0,00%	105 orang	7 orang	6,67%
Fasilitasi dan Pembinaan daerah	189.580.000	179.475.200	94,67%				1 provinsi	1 provinsi	100%			
Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota	877.510.000	780.640.100	88,96%				1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100%			
Penyusunan Kebijakan Penugasan Khusus	85.875.000	0	0,00%	107.582.000	64.003.200	59,49%	1 dokumen	1 dokumen draf KMK	100%	1 rekomendasi kebijakan	0	75,00%
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	26.891.673.000	21.296.527.072	79,19%	29.073.856.000	17.201.875.989	59,17%	1.593 orang	1411 orang	1	1.200 orang	935 orang	77,92%
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	4.155.420.000	3.039.403.426	73,14%	3.418.790.000	1.706.747.039	49,92%	270 orang	479 orang	175,56%	200 orang	206 orang	103,00%
Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	34.468.165.000	28.124.040.102	81,59%	38.286.112.000	20.831.825.563	54,41%	7.080 orang	7.537 orang	106,47%	4.000 orang	3.786 orang	94,65%
Pendayagunaan Dokter Spesialis	5.293.924.000	4.648.778.185	87,81%	10.259.061.000	8.165.422.289	79,59%	480 orang	552 orang	115%	480 orang	484 orang	100,83%
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	98.230.000	62.425.300	63,55%	710.735.000	576.488.300	81,11%	20 orang	30 orang	150%	20 orang	16 orang	80,00%
Pendayagunaan Dokter pasca internsip	19.700.000	0	0,00%	6.229.236.000	6.044.108.150	97,03%	130 orang	0	0,00%	1.000 orang	1.732 orang	173,20%
Pendayagunaan caregiver sebagai inovasi pelayanan bagi lansia				146.140.000	143.314.400	98,07%				25 orang	9 orang	36,00%
024.12.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	473.263.272.000	419.071.671.476	88.55%	533.284.026.000	505.468.174.976	88.55%	12.120 orang	10.694 orang	88,23%	12.500 orang	10.916 orang	87,33%
Internsip Dokter	473.149.592.000	419.071.671.476	88,57%	516.029.159.000	493.577.484.633	95,65%	12.000 orang	10.694 orang	89,12%	12.000 orang	10.524 orang	87,70%
Internsip Dokter Gigi	113.680.000	0	0,00%	17.254.867.000	11.890.690.343	68,91%	120 orang	0	0,00%	500 orang	392 orang	78,40%
Total	552.053.622.000	483.218.980.263	87,59%	630.341.671.000	564.453.742.414	88.55%						

Uraian Evaluasi Capaian Kinerja per RO (Rincian Output) Tahun 2022 ;

- Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen) ada penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dikarenakan lebih banyak Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi tidak mewajibkan penugasan khusus karena mengganggu lamanya masa studi dan pengaruh ke akreditasi institusi. Dengan masa tugas 6 bulan (lebih dari 3 bulan)
- Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dikarenakan ada program adaptasi untuk dokter spesialis WNI Lulusan Luar Negeri
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim ada penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dikarenakan di daerah kuota alokasinya kurang
- Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu ada penurunan capaian capaian kinerja dari tahun sebelumnya dikarenakan peminatnya kurang dan faktor keamanan yang belum maksimal di lokus penempatan
- Pendayagunaan Dokter Spesialis ada penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dikarenakan peminatan program dokter spesialis berkurang karena bersifat sukarela. PGDS bersifat sukarela sehingga tidak semua lulusan PBTL Non ASN dengan 7 jenis dokter spesialis mengikuti program ini dan belum semua RSUD mengusulkan kebutuhan dokter spesialisnya sehingga pilihan lokasi RS penempatan terbatas.
- Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat ada penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya karena bersifat sukarela. PGDS bersifat sukarela sehingga tidak semua lulusan PBTL NonASN dengan 7 jenis dokter spesialis mengikuti program ini dan belum semua RSUD mengusulkan kebutuhan dokter spesialisnya sehingga pilihan lokasi RS penempatan terbatas.
- Untuk Pendayagunaan SDM Indonesia ke Luar Negeri, Pendayagunaan SDM WNA, Pendayagunaan Dokter pasca internsip, Pendayagunaan Dokter pasca internsip; masing-masing ada peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya
- Internsip Dokter dan Internsip Dokter Gigi ada penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya dikarenakan Jumlah peserta yg mengikuti PIDI dan PIDGI tidak sesuai dengan target yg ditetapkan

Permasalahan di tahun 2022 terkait penyerapan anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan adalah:

- Perubahan regulasi dalam penempatan dokter spesialis dimana saat ini sudah tidak lagi bersifat wajib, menyebabkan penurunan jumlah dokter spesialis yang berpartisipasi dalam PGDS, sehingga terdapat penurunan capaian output dalam pemberangkatan PGDS di 32 Provinsi selain di Papua dan Papua Barat
- Ijin prinsip persetujuan besaran insentif untuk dokter spesialis WNI lulusan luar negeri baru terbit pada akhir Oktober 2022, sehingga pelaksanaan penempatan dokter spesialis WNI lulusan luar negeri tidak bisa dimulai lebih awal, sehingga Kepmenkes sebagai dasar hukum pemberian insentif dokter adaptan WNI LLN, sebagai turunan dari ijin prinsip insentif WNI LLN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan juga terbit menyusul. Hal ini membawa konsekuensi tidak terserapnya secara maksimal alokasi anggaran Insentif di RO Pendayagunaan Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri dimana targetnya adalah 105 orang, dengan capaian per 31 Desember 2022 sejumlah 7 orang dokter spesialis adaptan.
- Perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari daring menjadi luring
- Penyerapan perjalanan dinas pemberangkatan dan pemulangan peserta penugasan khusus tidak optimal karena peserta berasal dari lokasi sekitar lokus.
- Bantuan Biaya Hidup Dokter, Dokter Gigi Internsip yang dialokasikan untuk 12.500 peserta, terealisasi untuk 10.701 orang.

Efisiensi Sumberdaya

Sumber daya anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mengalami penyesuaian sepanjang tahun 2022. Kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan tiap satker mengidentifikasi anggaran yang dapat direvisi untuk prioritas pembiayaan yang lebih mendesak. Alokasi pada DIPA awal Pusrengun sampai dengan DIPA revisi 22 Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di bulan mengalami pengurangan sebesar Rp. 174.414.819.000. Selain karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena kendala regulasi, sebagian anggaran yang direvisi diambil dari efisiensi kegiatan. Kegiatan pertemuan tatap muka diubah menjadi pertemuan secara virtual sehingga kebutuhan anggaran berkurang.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada dilakukan tanpa mengurangi target kinerja organisasi maupun individu. Adanya target kinerja yang belum dapat dicapai dikarenakan kendala teknis terkait regulasi dan para pemangku kepentingan terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) memberikan gambaran akuntabilitas kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. Target kinerja Tahun 2022 belum seluruhnya tercapai 100%. Rata-rata Capaian target kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rata-rata Capaian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Per 31 Desember Tahun 2022

No.	IKK	Target	Capaian	% Terhadap Target
1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96%	96,00%
2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%	34 %	85,00 %
3	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%	56%	93,33%
4	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %	100%	100,00%
5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	500 orang	100,00%
6	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	98,99%	101,01%

Capaian kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2022 tertinggi yaitu Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan, Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi dan Persentase

dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes dengan capaian 100 %. Sementara capaian terendah yaitu Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi sebesar 85 %.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan data dan kondisi per 31 Desember 2022. Kendala pelaksanaan kegiatan perlu ditindaklanjuti di tahun 2023 antara lain :

- a. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan nomor 1-3, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan akan meningkatkan advokasi ke pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan melalui P3K, CPNS, BLUD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan nomor 4, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan akan optimalkan penyerapan anggaran Insentif di RO Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri bagi dokter spesialis adaptan dan pendamping
- c. Penyusunan perencanaan kegiatan dan penarikan dana yang lebih cermat untuk mendukung pencapaian target kinerja

Diharapkan Laporan Kinerja yang tersusun ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan periode mendatang.

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Irmansyah, Sp.Kj(K)

Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2021

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

Dr. dr. Irmansyah, Sp.Kj(K)
NIP 196201231986111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	1. Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	5.400 orang
		2. Jumlah Calon Dokter Spesialis pada Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen)	100 orang
		3. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang di dayagunakan	700 orang
		4. Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	600 orang
		5. Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	39 dokumen
		6. Jumlah Pendayagunaan SDM Luar Negeri	390 orang
2	Terlaksananya internsip dokter	Jumlah Dokter yang melaksanakan Internsip	12.000 orang

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 812.049.520.000,00
(Delapan ratus dua belas milyar empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

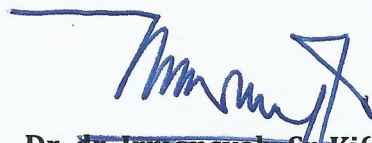
Jakarta, 15 Desember 2021

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama



Dr. dr. Irmansyah, Sp.Kj(K)
NIP 196201231986111001

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

**DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN
TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 April 2022

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.
NIP 196607221989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan	1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100 %
		2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40 %
		3. Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	60 %
		4. Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %
		5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang
2	Terlaksananya internsip tenaga kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98 %

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 805.761.098.000,00

(Delapan ratus lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Jakarta, 28 April 2022

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama



Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.
NIP 196607221989031002

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

**DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN
TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Juli 2022

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.
NIP 196607221989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan	1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100 %
		2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40 %
		3. Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	60 %
		4. Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %
		5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang
2	Terlaksananya internsip tenaga kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98 %

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 662.110.184.000.00

(Enam ratus enam puluh dua milyar seratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Kegiatan

2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

6812 Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

5234 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Anggaran

Rp. 17.384.930.000,-

Rp. 111.151.628.000,-

Rp 533.573.626.000,-

Jakarta, 25 Juli 2022

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama



Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.
NIP 196607221989031002

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Jabatan : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2022

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D
NIP 197112111996022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan	1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100 %
		2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40 %
		3. Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	60 %
		4. Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %
		5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang
2	Terlaksananya internsip tenaga kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98 %

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 630.341.671.000.00

(Enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Kegiatan

2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
6812 Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
5234 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Anggaran

Rp. 17.303.880.000,-
Rp. 79.753.765.000,-
Rp 533.284.026.000,-

Jakarta, 30 November 2022

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D
NIP 197112111996022001

LAMPIRAN 3

JENIS NAKES PADA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATN SECARA TIM (NST) PER DESEMBER 2022

NO.	PROVINSI	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesling	Kemas	ATLM	TOTAL
1	ACEH	4	3	5	4	5	6	5	5	5	42
2	BENGKULU			1	1	2	2	2	1	1	10
3	GORONTALO			1	1		1	1	1	1	6
4	KALIMANTAN BARAT	3	4	4	3	2	2	1	2	2	23
5	KALIMANTAN TENGAH	2	2	2	4	1	2	3	3	3	22
6	KALIMANTAN UTARA	1	1		1		1	1	1	1	7
7	KEPULAUAN RIAU	1		1	1	1		1	1	1	7
8	LAMPUNG		1	2		3	2	3	3	2	16
9	MALUKU	10	6	18	21	18	21	15	17	15	141
10	MALUKU UTARA	11	7	11	6	15	12	14	11	14	101
11	NUSA TENGGARA TIMUR	2	2	1	1	2	2		1	1	12
12	PAPUA	10	3	6	5	7	10	7	7	8	63
13	PAPUA BARAT	4		2	4	6	6	4	4	6	36
14	SULAWESI SELATAN	3		2	1	4	2	3	3	4	22
15	SULAWESI TENGAH	8	4	5	4	10	7	10	3	9	60
16	SULAWESI TENGGARA	8	8	6	6	8	7	9	7	10	69
17	SULAWESI UTARA	1	1		1				1	1	5
18	SUMATERA BARAT	2			2	1	1	3	3	3	15
19	SUMATERA SELATAN	1				1	1	1	1	1	6
20	SUMATERA UTARA	10	10	9	12	19	18	19	15	18	130
Grand Total		81	52	76	78	105	103	102	90	106	793

LAMPIRAN 4

JENIS NAKES PADA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN SECARA INDIVIDU (NSI) PER DESEMBER 2022

NO.	PROVINSI	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Gizi	Farmasi	Kesling	Kesmas	ATLM	TOTAL
1	ACEH	7	11	15	1	25	7	14		19	99
2	BANTEN			6				1			7
3	BENGKULU	7		10		9	21	17	5	15	84
4	GORONTALO	3	3	7	3		4	5		19	44
5	JAMBI	4	5	4	4	31	13	16	7	19	103
6	JAWA BARAT	3	3			17	5	14	4	10	56
7	JAWA TENGAH		3	8	5	1	1		1		19
8	JAWA TIMUR		1				3	3		1	8
9	KALIMANTAN BARAT	10	17	8	16	22	7	7	13	21	121
10	KALIMANTAN SELATAN	4	1	2	3	1	1	1		4	17
11	KALIMANTAN TENGAH	2	13			15	5	15	1	13	64
12	KALIMANTAN TIMUR			1	1	15	3	4	2	3	29
13	KALIMANTAN UTARA	1	2	1	2	7	2		1	6	22
14	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			1	1			1	1	1	5
15	KEPULAUAN RIAU	1		1	2	6				9	19
16	LAMPUNG	1	10			13	6	8	2	8	48
17	MALUKU	16	3	8	19	20	29	11	13	28	147
18	MALUKU UTARA	11		3	2	17	20	19	1	27	100
19	NUSA TENGGARA BARAT		7	5	5	8	6	5	3	7	46
20	NUSA TENGGARA TIMUR	13	25	10	25	32	19	17	4	25	170
21	PAPUA	4		18	17	23	8	15	10	14	109
22	PAPUA BARAT	2		2	11	3	10	7	5	10	50
23	RIAU		2	2	2	12	12	15	3	15	63
24	SULAWESI BARAT	5		4	4	8	1	5		7	34
25	SULAWESI SELATAN	3	2	7	9	17	7	9	3	19	76
26	SULAWESI TENGAH	9	39	5	7	21	6	14		48	149
27	SULAWESI TENGGARA	18	2	57	37	27	11	28	6	50	236
28	SULAWESI UTARA	2	13	15	27	13	13	7	3	39	132
29	SUMATERA BARAT	1	7	4	7	6	10	7	3	12	57
30	SUMATERA SELATAN	3		4		8	6	2	1	6	30
31	SUMATERA UTARA	12	5	9	1	16	15	29	8	23	118
Grand Total		142	174	217	211	393	251	296	100	478	2262

LAMPIRAN 5

Rekap Penempatan PGDS Tahun 2022 Per Angkatan Dan Per Jenis Spesialis
Berdasarkan Jenis Spesialisasi Per Angkatan

ANGKATAN	Nasional								Papua dan Papua Barat						Total per Angkatan
	Sp. A	Sp. OG	Sp. PD	Sp. B	Sp. An	Sp. PK	Sp. Rad	Total	Sp. A	Sp. OG	Sp. PD	Sp. B	Sp. PK	Total	
XVII	22	20	25	28	8	21	19	143		1		2		3	146
XVIII	35	15	22	25	9	10		116	1	1	3	1		6	122
XIX	2	13	2	11	6	6		40					1	1	41
XX	20	19	15	11	10	2	2	79				1		1	80
XXI	20	27	26	8	9	7	9	106	1	1	1	2		5	111
Jumlah per Spesialisasi	99	94	90	83	42	46	30	484	2	3	4	6	1	16	500

LAMPIRAN 6

CAPAIAN PIDI & PIDGI TAHUN 2022 BERDASARKAN SK AWAL

PIDI

No	URAIAN	ANGKATAN	PERIODE	TAHUN	JUMLAH
1	Data Peserta PIDI	I	FEBRUARI	2022	2.854
2	Data Peserta PIDI	II	MEI	2022	2.042
3	Data Peserta PIDI	III	AGUSTUS	2022	2.329
4	Data Peserta PIDI	IV	NOVEMBER	2022	3.299
JUMLAH					10.524

PIDGI

No	URAIAN	ANGKATAN	PERIODE	TAHUN	JUMLAH
1	Data Peserta PIDGI	I	NOVEMBER	2022	392
JUMLAH					392

TOTAL PESERTA PIDI & PIDGI TAHUN 2022					10.916
--	--	--	--	--	---------------

Capaian TKKI ke LN Tahun 2022

Jumlah Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Jumlah Tenaga Kesehatan	Negara Penempatan	Mekanisme Pemberangkatan	Keterangan
1.	4 orang	KSA	Mekanisme mandiri	Berangkat pada bulan April
2.	5 orang	KSA	Mekanisme mandiri	Berangkat pada bulan Mei
3.	287 orang	Jepang	G to G (Skema IJEPA)	Berangkat bulan Juni
4.	20 orang	Belanda	G to P (Program Yomema)	Berangkat bulan Juni
5.	35 orang	Belanda	G to P (Program Yomema)	Berangkat bulan September
6.	8 orang	Belanda	G to P (Program Yomema)	Berangkat bulan Oktober
7.	50 orang	Belanda	G to P (Program Yomema)	Berangkat bulan November
8.	20 orang	Belanda	G to P (Program Yomema)	Berangkat bulan Desember
Total: 429 orang (126,12 % dari target jumlah penempatan sebesar 340 orang)				

LAMPIRAN 7

Data Penempatan Peserta Adaptasi

No	Nama	Spesialisasi	Pendamping	RS	Kabupaten	Provinsi
1	dr. Anastasia Pranoto	Orthopaedi dan Traumatologi	Dr. M Bayu R, Sp.OT	RSU Cut Meutia	Aceh Utara	Aceh
2	dr. Ikhwani	Orthopaedi dan Traumatologi	dr. Delta Darussalam Effendy, Sp.OT (K) Spine, FICS	RSU Dr. Fauziah	Bireun	Aceh
3	dr. Einstein Yefta Endoh	Orthopaedi dan Traumatologi	Dr. Djarot Noersasongko, Sp.OT	RSUD ODSK	Manado	Sulut
4	dr. Kelvin Marwali	Ilmu Penyakit Dalam	dr. Hendra Yandi Saputra, Sp. PD	RSUD Palmatak	Anambas	Kepulauan Riau
5	dr. Lydia Linggawaty	Ilmu Penyakit Dalam	dr. Agus Sutanto Sp.PD	RSUD Zainal Abidin Pagaralam	Way Kanan	Lampung
6	dr. Pramanta	Ilmu Penyakit Dalam	dr. Irham Purnomo, Sp.PD	RSUD Kubu Raya	Kubu Raya	Kalimantan Barat
7	dr. Andreas Suhartoyo Winarno	Obstetri dan Ginekologi	dr. Elson Djakaria Sp.OG	RSUD Otanaha	Gorontalo	Gorontalo

LAMPIRAN 8

Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2020)

No	Indikator	Tahun							
		2020		2021		2022		2023	2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian TW 1	Target	Target
1	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan								
	a. Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	5.928 orang	6.262 orang (105,6%)	7.250 orang	9.427 orang (130,03%)	5.400 orang	1.015 orang (18,80%)	5.400 orang	5.400 orang
	b. Jumlah calon dokter spesialis pada penugasan khusus calon dokter spesialis (residen)	100 orang	127 orang (127%)	100 orang	157 Orang (157%)	100 orang	54 orang (54%)	100 orang	100 orang
	c. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan	700 orang	510 orang (73%)	700 orang	582 orang (83,14%)	700 orang	146 orang (20,86%)	700 orang	700 orang
	d. Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	-	-	400 orang	-	600 orang	-	800 orang	800 orang
	e. Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	39 dokumen	39 dokumen (100%)	39 dokumen	38 dokumen (97,43%)	39 dokumen	-	39 dokumen	39 dokumen
	f. Jumlah pendayagunaan SDM Luar Negeri	350 orang	349 orang (99,71%)	370 orang	355 orang (95,95%)	390 orang	10 orang (2,56%)	410 orang	430 orang
2	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internsip	12.000 orang	10.360 orang (86,33%)	12.000 orang	10.694 orang (89,12%)	12.000 orang	2.856 orang (23,80%)	12.000 orang	12.000 orang

LAMPIRAN 9

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Permenkes 13 tahun 2022)

No	Tahun				
	Indikator	2022		2023	2024
		Target	Capaian	Target	Target
1	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN				
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Kesehatan				
	a) Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96%	100%	100%
	b) Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%	34%	50%	60%
	c) Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%	56%	80%	90%
	a) Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%	100%
2	b) Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	500 orang	600 orang	700 orang
	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
	Kegiatan : Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan				
	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	98,99%	98%	98%